



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BERAU

## TAHUN ANGGARAN 2024



TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Tiada kata selain puji dan syukur Kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala, yang telah memberi nikmat kekuatan, semangat dan kesehatan lahir batin sehingga kami dapat merampungkan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RLPPD merupakan ringkasan laporan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, yang disampaikan dan dipublikasikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas. Tanggapan masyarakat akan menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga beberapa target kinerja pembangunan dapat tercapai meskipun masih ditemui permasalahan yang memerlukan strategi dalam penyelesaiannya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau tercermin dari diperolehnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas

dukungan dan kerjasama Pimpinan serta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Berau. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Perempuan, Pimpinan Partai Politik, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau yang telah bersama dan berupaya mendukung program pemerintah daerah serta menciptakan situasi kondusif sehingga Kabupaten Berau mampu meraih keberhasilan diberbagai sektor kehidupan.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tanjung Redeb, 25 Maret 2025

BUPATI BERAU,



*[Handwritten signature]*

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

## I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram. Selain itu, dari hasil pembangunan diharapkan dapat memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan harga diri. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan di suatu daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan prioritas pembangunan dalam pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Daerah harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dimilikinya, kendala-kendala yang akan dihadapi dan peluang-peluang yang ada untuk dapat merencanakan pembangunan daerah secara tepat. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah terlebih dahulu diperlukan adanya perencanaan. Dimanakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran

utama yang sangat penting. Melalui data tersebut maka dihasilkan indikator-indikator yang dapat digunakan dalam proses menyusun perencanaan dan evaluasi mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Indikator yang seringkali digunakan oleh pemerintah daerah untuk maksud diatas adalah indikator ekonomi makro yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Adapun ringkasan indikator ekonomi makro Kabupaten Berau tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Berau, 2023-2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Satuan	2023	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	76,71	77,17
2	Angka Kemiskinan	Persen	5,54	5,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,95	5,15
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,44	7,28
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	198,53	194,08
6	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> )	-	0,327	0,317

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025*

#### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan tujuan akhir segala macam pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dengan kata lain IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM sendiri dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan

(*knowledge*), dan *standard hidup layak* (*decent standard of living*). Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu dimensi standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 1.2 Perkembangan IPM Regional Kalimantan Timur, 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	72,43	73,34	73,85	74,56	75,13
2	Kutai Barat	71,42	72,31	73,16	73,97	74,76
3	Kutai Kartanegara	74,19	74,69	75,31	75,95	76,57
4	Kutai Timur	73,32	74,15	74,69	75,33	75,90
5	<b>Berau</b>	<b>75,19</b>	<b>75,69</b>	<b>76,24</b>	<b>76,71</b>	<b>77,17</b>
6	Penajam Paser Utara	72,4	73,01	73,56	74,33	74,94
7	Mahakam Ulu	67,5	68,36	69,17	70,02	70,79
8	Kota Balikpapan	80,35	81,07	81,49	82,03	82,62
9	Kota Samarinda	80,39	81,05	81,72	82,61	83,11
10	Kota Bontang	80,06	80,65	81	81,63	82,49
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>76,61</b>	<b>75,94</b>	<b>76,6</b>	<b>77,36</b>	<b>78,79</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025

Jika ingin melihat capaian derajat kesejahteraan masyarakat dengan membandingkan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur cukup relatif bervariasi.

Berdasarkan pengelompokan IPM, terdapat tiga kota yang berstatus IPM “sangat tinggi” yaitu Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang memiliki angka IPM di atas IPM Kalimantan Timur yang sebesar 78,79. Sedangkan kabupaten lainnya memiliki IPM “tinggi. Secara peringkat, IPM Kabupaten Berau tahun 2024 yang sebesar 77,17 masih menempati urutan ke empat dan masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur. IPM Kabupaten Berau cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan IPM provinsi yang juga cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan bahwa semakin baiknya akses masyarakat untuk memperoleh kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Hal ini terlihat dari data jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang semakin meningkat walaupun di beberapa kecamatan masih ada yang perlu ditingkatkan lagi.

Selanjutnya pada Tabel 1.3 memperlihatkan perbandingan IPM Kabupaten Berau dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur dan IPM Nasional. Terlihat bahwa IPM Kabupaten Berau masih lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur, namun lebih tinggi dari IPM level nasional. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Berau telah berlangsung baik, namun hal ini tidak lantas membuat Kabupaten Berau berbangga diri, tetapi akan tetap melanjutkan peningkatan pembangunan daerah.

Tabel 1.3 Perkembangan IPM Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, 2023-2024

No	Uraian	2023	2024	Perubahan
1	IPM Kabupaten Berau	76,71	77,17	0,60%
2	IPM Provinsi Kalimantan Timur	<b>78,2</b>	<b>78,79</b>	0,75%
3	IPM Nasional	74,39	75,02	0,85%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025

## **b. Angka Kemiskinan**

Sejak mandat tata kelola pemerintahan yang mandiri diberikan kepada pemerintah daerah atau yang dikenal dengan desentralisasi, pemerintah daerah berhak untuk menentukan kebijakan otonomi atas daerah masing-masing. Kebijakan-kebijakan yang diambil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas-fasilitas publik yang layak dan memadai guna membantu penduduk yang ada pada kabupaten/kota. Secara umum, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan hendaknya selaras dengan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kendati kesejahteraan tidak mutlak dapat dinyatakan dalam indikator kemiskinan, kemiskinan tetap mampu menjadi salah satu indikator yang kontradiktif dengan label masyarakat yang sejahtera

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Data yang digunakan untuk menyusun komponen kebutuhan dasar tersebut berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Batas ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran inilah yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan

(GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Tabel 1.4 Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Berau, 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2020	568.500	12,3	5,19
2021	595.550	13,62	5,88
2022	624.948	13,31	5,65
2023	677.819	13,26	5,54
2024	731.250	12,35	5,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025

Jika melihat Tabel 1.4 sepanjang tahun 2020 hingga 2024 GK Kabupaten Berau menunjukkan tren peningkatan. Berada pada rentang 500-700 ribuan per kapita per bulan, pada tahun 2023 GK ini meningkat hingga mencapai Rp. 677.819,00 per kapita per bulan dan meningkat lagi menjadi Rp. 731.250 perkapita pada tahun 2024, dimana hal ini menunjukkan peningkatan standar hidup masyarakat Berau. Peningkatan GK bisa diindikasikan sebagai adanya peningkatan standar hidup minimum yang didukung oleh inflasi atau kenaikan atas harga-harga. Peningkatan GK yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan riskan untuk menghasilkan keluaran analisis berupa

peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak pada suatu wilayah. Sebab, dengan pendapatan yang tidak bertambah penduduk yang semula dapat dikategorikan tidak miskin menjadi tergeser menjadi miskin dengan batas minimum yang semakin meningkat.

Penurunan ini juga sejalan dengan persentase penduduk miskin yang turun 0,46 poin persen mencapai 5,08 persen pada tahun 2024. Rapor hijau atas kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang diimplementasikan. Arah kebijakan dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Berau yang secara nyata dapat dilihat untuk menekan angka kemiskinan yaitu, melalui penajagan atas daya beli masyarakat dengan cara mempercepat belanja pemerintah daerah dan dana desa, BLT, subsidi, dan relaksasi pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong aktivitas produksi melalui dukungan pada sektor-sektor perekonomian unggulan seperti sektor pariwisata dan pertanian. Selanjutnya, pada bidang pendidikan pemerintah daerah juga melakukan peningkatan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan. Salah satu wujud nyata atas perencanaan ini ialah diberikannya peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Propinsi Kalimantan Timur dan Nasional, persentase kemiskinan Kabupaten Berau masih memiliki angka yang lebih rendah, dimana pada tahun 2024 propinsi Kalimantan Timur sebesar 5,78 persen dan nasional 9,03 persen sedangkan Kabupaten Berau hanya sebesar 5,08 persen.

Tabel 1.5 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2022-2023

No	Tingkat Kemiskinan	2023	2024	Perubahan
1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau	5,54	5,08	0,46
2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Berau	13,26	12,35	0,91
3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur	6,11	5,78	0,33
4	Persentase Penduduk Miskin Nasional	9,36	9,03	0,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025

### c. Angka Pengangguran

Penduduk dapat dikatakan sebagai aspek ketersediaan (*supply*) bagi pasar tenaga kerja di suatu daerah. Sehingga keberadaan penduduk menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Namun, tidak semua penduduk dapat memasuki pasar tenaga kerja. Karena ada syarat tertentu seperti harus berusia kerja. Sehingga data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Salah satu data ketenagakerjaan yang sangat penting digunakan untuk mendukung perkembangan ketenagakerjaan yang berkelanjutan adalah pengangguran.

Perkembangan pengangguran di Kabupaten Berau dapat melihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mencerminkan kondisi pengangguran di suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dapat menilai keberhasilan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan. TPT merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang

mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Berau pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,15 persen meningkat sebesar 0,20 dari tahun 2023 yaitu sebesar 5,93 persen. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 4 sampai 5 penduduk Kabupaten Berau yang menganggur dari 100 penduduk angkatan kerja.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Berau, 2024

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>I. Angkatan Kerja</b>	<b>91.447</b>	<b>42.094</b>	<b>133.541</b>
1. Bekerja	87.475	39.195	126.670
2. Pengangguran	3.972	2.889	6.871
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>14.863</b>	<b>48.776</b>	<b>63.639</b>
1. Sekolah	7.675	8.077	15.752
2. Mengurus Rumah Tangga	1.667	38.337	40.004
3. Lainnya	5.521	2.362	7.883
<b>Jumlah Penduduk Berumur</b>	<b>106.310</b>	<b>90.870</b>	<b>197.180</b>
15 Tahun ke Atas			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. 2025

#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, dalam arti bahwa pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah. Secara matematis,

pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perubahan nilai total PDRB tahun berjalan dibandingkan dengan nilai total PDRB tahun sebelumnya dimana dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Melalui penghitungan ini, angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan riil yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian pada periode tertentu dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya apabila negatif menunjukkan adanya penurunan

Dalam kondisi perekonomian yang meningkat, jika angka pertumbuhan ekonomi tahun berjalan lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya. maka dapat dikatakan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun. jika angka pertumbuhan ekonomi tahun berjalan lebih kecil dari pertumbuhan tahun sebelumnya. mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut melambat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi selama tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2020-2024\*\*

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,51	1,99	2,92	2,18	1,92
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	4,48	7,04	3,31	5,74	7,88
<b>C</b>	Industri Pengolahan	-0,32	-3,09	3,63	4,07	4,18
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	6,33	0,69	3,34	8,38	12,20
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,02	4,13	5,75	5,51	7,51
<b>F</b>	Konstruksi	-9,17	0,75	7,34	9,10	10,21
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,58	2,40	6,00	5,34	6,83
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	-3,58	5,16	6,10	6,35	7,64
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,63	1,48	7,72	5,63	9,44
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	7,24	6,44	6,31	5,39	7,78
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,27	8,53	10,23	8,24
<b>L</b>	Real Estate	1,37	1,94	2,85	1,29	4,55
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	-5,65	6,01	5,17	6,14	7,63

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
<b>D</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,45	0,74	6,26	9,41	24,36
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	4,88	4,54	4,77	4,07	5,27
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,41	21,14	4,73	4,81	4,89
<b>R.S.T.U</b>	Jasa lainnya	-2,04	1,94	6,84	5,95	8,22
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>-3,32</b>	<b>5,36</b>	<b>3,35</b>	<b>5,44</b>	<b>7,28</b>

Keterangan : \*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. 2025

Dengan adanya berbagai program dan kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta adanya situasi global yang memberikan keuntungan bagi perekonomian Kabupaten Berau, menyebabkan perekonomian dapat tumbuh positif sebesar 7.28 persen pada tahun 2024. Perbaikan kinerja ekonomi tersebut terjadi pada semua lapangan usaha yakni 17 lapangan usaha memiliki pertumbuhan positif pada tahun 2024. Adapun lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 24,36.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Berau, mengalami peningkatan kegiatan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 7,88 persen pada tahun 2024. Salah satu penyebab utama dari pertumbuhan positif ini adalah meningkatnya produksi batu bara dimana dipicu oleh kenaikan rata-rata HBA selama tahun 2024.

#### e. PDRB Perkapita

Dari series data PDRB dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB. salah satunya adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk di suatu daerah. rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar PDRB per kapita tersebut. PDRB per

kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi jumlah penduduk. Untuk dapat meningkatkan nilai PDRB per kapita, suatu daerah harus dapat meningkatkan nilai PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun sesungguhnya, PDRB per kapita ini tidak serta menunjukkan bahwa setiap penduduk memiliki peran produktif dalam menciptakan nilai tambah.

PDRB per kapita ini hanya memberikan gambaran secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan apakah penduduk tersebut benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, setidaknya indikator ini dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita yang meningkat menunjukkan bahwa persentase kenaikan PDRB nominal lebih besar dibandingkan persentase penambahan penduduk. Sedangkan PDRB per kapita yang menurun menunjukkan bahwa persentase kenaikan PDRB nominal lebih kecil dari persentase penambahan jumlah penduduk atau karena PDRB nominal yang mengalami penurunan.

Tabel 1.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah). 2020-2024\*\*

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024
PDRB Per Kapita	143,67	171,49	236,23	198,53	194,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025

Berdasarkan Tabel 1.8 dapat terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Berau pada tahun 2024 mencapai **194,08** juta rupiah, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar **198,53** juta rupiah.

Angka ini berarti bahwa secara ekonomi setiap penduduk di Kabupaten Berau. rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar **194,08** juta rupiah selama tahun 2024.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan**

Tujuan terpenting dari suatu pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk. Kondisi ini dapat tergambarkan melalui penurunan angka kemiskinan. dimana hal ini dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Strategi pembangunan yang hanya terfokus pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tanpa disertai pendistribusian pendapatan yang lebih merata akan menyebabkan pertumbuhan hanya dinikmati oleh sekelompok golongan masyarakat sehingga timbul ketimpangan yang semakin besar. Menurut Siregar (2006). pertumbuhan ekonomi hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan. termasuk golongan miskin (*growth with equity*) sehingga pertumbuhan efektif dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu. muncul sebuah gagasan baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat berpihak pada penduduk miskin (*pro-poor growth*).

Menurut Bappenas (2004). kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda. tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang ketat antar keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan. pemenuhan kebutuhan dasar dan kapabilitas). sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Karena itu. indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali

digabungkan dalam analisis dan penilaian kemiskinan.

Koefisien gini (*gini ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Koefisien gini sebagai ukuran distribusi pendapatan memiliki nilai antara 0 dan 1. Jika suatu distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien gini mendekati nol. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan tidak merata jika nilai koefisien gini mendekati satu. Apabila nilai koefisien gini mendekati 0, kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila nilai koefisien gini mendekati 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan tinggi. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan kelompok masyarakat, koefisien gini dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

- Koefisien Gini > 0.50 : Tingkat ketimpangan tinggi
- Koefisien Gini 0.40 - 0.50 : Tingkat ketimpangan sedang
- Koefisien Gini < 0.40 : Tingkat ketimpangan rendah

Tabel 1.9 Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Berau, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Koefisien Gini	0,3	0,377	0,352	0,327	0,317

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025

Rasio gini Kabupaten Berau selama lima tahun terakhir berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah, selalu berada di bawah 0,40. Sempat meningkat pada tahun 2021 dengan 0,377, tahun 2022 rasio gini kembali turun menjadi 0,352 dan turun lagi pada tahun 2024 menjadi 0,317. Walaupun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi yakni dengan kisaran 0,300, penurunan ini menunjukkan indikasi yang positif. Penurunan rasio gini pada tahun 2024, tidak terlepas dari penurunan jumlah penduduk miskin dan pergeseran distribusi pendapatan penduduk menuju kelompok yang tertinggi. Rasio gini yang terus menunjukkan tren negatif lambat laun akan menuju area

konsentrasi maksimum yang artinya pendapatan telah terdistribusi secara merata. Jika kita membandingkan gini ratio Kabupaten Berau dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Nasional terlihat bahwa pada tahun 2023, tingkat ketimpangan di Kabupaten Berau (0.327) lebih tinggi dibandingkan tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Timur (0.322), namun masih dibawah ketimpangan nasional (0.388). Pada tahun 2024 dimana gini ratio kabupaten Berau mencapai (0,317) di bawah Propinsi kalimantan Timur yang mencapai 0,321 dan dibawah nilai gini ratio nasional yang mencapai 0,379.

Tabel 1.10 Perbandingan Koefisien Gini di Kabupaten Berau. Provinsi Kalimantan Timur. dan Nasional. 2020-2024

No	Uraian	2023	2024	Perubahan
1	Koefisien Gini Kabupaten Berau	0,327	0,317	0,010
2	Koefisien Gini Provinsi Kalimantan Timur	0,322	0,321	0,001
3	Koefisien Gini Nasional	0,388	0,379	0,009

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2025

## II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian pelaksanaan kinerja urusan pelayanan dasar Kabupaten Berau Tahun 2024 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci outcome sesuai yang tercantum dalam 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tabel berikut :

### a. Urusan Pendidikan

Capaian penyelenggaran urusan Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian penyelenggaran urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	jumlah anak usia 5-6 tahun adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) ----- x 100% jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	8.900 -----x100 11.907	74,75
2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% jumlah anak usia 7 - 12 tahun pada daerah yang bersangkutan	34.622 -----x100 35.892	96,46
3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% jumlah anak usia 13-15 tahun pada daerah yang bersangkutan	16.140 -----x100 17.145	94,14
4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	jumlah anak 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada daerah yang bersangkutan	797 -----x100 3.064	26,01

Sumber : Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

## b. Urusan Kesehatan

Capaian penyelenggaraan urusan Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian penyelenggaraan urusan Kesehatan TA 2024

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk dikabupaten / kota}} \times 100\%$	270 ----- x1000 299.005	0,90
2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Rsd di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	2 ----- x100 2	100,00
3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$	3.778 ----- x100 5.192	72,77
4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Persalinan}}{\text{Jumlah ibu Bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$	4.740 ----- x100 5.192	86,10
5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100\%$	3.642 ----- x100 4.342	89,10
6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita dikabupaten/kota}} \times 100\%$	18.455 ----- x100 25.961	71,09
7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan standar}}{\text{Jumlah Anak usia pendidikan dasar dikabupaten/kota}} \times 100\%$	38.151 ----- x100 53.0371	71,93
8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 di kabupaten / kota}} \times 100\%$	78.545 ----- x100 199.170	39,44
9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standa	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahu keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahu keatas di kabupaten / kota}} \times 100\%$	11.266 ----- x100 17.081	65,96
10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi yang di kabupaten / kota}} \times 100\%$	23.482 ----- x100 23.482	100
11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten / kota}} \times 100\%$	5.680 ----- x100 5.680	100
12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten / kota}} \times 100\%$	230 ----- x100 230	100

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di kabupaten / kota	6.782 -----x100 6.782  100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	6.191 -----x100 6.199  99,87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, 2024

### c. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum TA 2024

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) ----- x 100% luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)	0 -----x100 1  Tidak ada wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten berau
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten /Kota (m) ----- x 100% luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten /Kota (m)	0 -----x100 1  Tidak ada wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten berau
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab/kota kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan(ha) direhabilitasi (ha) dioperasikan dan dipelihara (ha) ----- x 100% luas daerah kewenangan kab/kota	1.278 -----x100 1.278  100,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota ----- x 100% jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupatkabupaten/kota	51.033 -----x100 61.359  83,17
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di kabupaten / kota	56.200 -----x100 61.359  91,59

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% jumlah IMB yang berlaku	199 -----x100 199 100,00
7	Tingkat Kemanjapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap ----- x 100% Panjang jalan keseluruhan diwilayah kab/kota	1.179,72 -----x100 1.686,08 69,97
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analisis diwilayah kab kota	314 -----x100 314 100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	985 -----x100 985 100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau

#### d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tabel 2.4 Capaian penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA 2024

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (2020) ----- x 100% jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (2020)	0 -----x100 1 Tidak terjadi bencana yang berdampak pada Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	(Rumah Tangga Penerima Fasilitas penggantian Hak atas penguasaan tanah dan bangunan) + (rumah tangga penerima subsidi uang sewa) + (rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni) ----- x 100% jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni)	0 -----x100 1 tidak ada kebijakan relokasi Tahun 2024
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	2,47 -----x100 2,47 100

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% jumlah total unit rumah kabupaten	4.279 -----x100 56.321	7,58
5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% jumlah unit perumahan kab/kota	2.378 -----x100 5.881	40,44

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

#### e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau sebagai berikut :

##### 1) Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.6 Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja TA 2024

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan penyelenggara yang masuk	10 ----- x 100 10	100
2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah pengaduan yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	4 ----- x 100 4	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau

## 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.7 Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2024

Indikator Kinerja Kunci	Keluaran	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	229.842 ----- x 100 266.800	86,15
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	437 ----- x 100 11.064	3,95
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	2.479 ----- x 100 2.479	100
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$	50 ----x100 50	100
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	641 menit/50 kejadian	12,82 menit

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### f. Urusan Sosial

Capaian penyelenggaraan urusan Sosial berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome di Dinas Sosial Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tabel 2.5 Capaian penyelenggaraan urusan Sosial TA 2024

Indikator Kinerja Kunci	Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia yang terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia yang terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	1.400 ----- x 100 1.400	100

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK OUTCOME)	Rumus Persamaan	Elemen Data/Isian Data	Capaian Kinerja
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota  Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran  ----- x 100%  Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	$\frac{270}{270} \times 100$	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Berau

### III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

#### a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah memberikan penghargaan berdasarkan hasil EPPD melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu, Status Kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah dan Sangat Rendah.

Adapun Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan hasil EPPD terhadap LPPD secara Nasional adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional terhadap LPPD Kab Berau

No	Tahun Anggaran	Skor	Status Kinerja	Ket
1	LPPD TA. 2018	3,3648	Sangat Tinggi	
2	LPPD TA. 2019 dan LPPD TA. 2020	-	-	Tidak Ada Penilaian karena adanya transisi regulasi penilaian
3	LPPD TA. 2021	2,18	Rendah	
4	LPPD TA. 2022	3,1964	Sedang	
5	LPPD TA. 2023	-	-	Menunggu Keputusan Mendagri

Sumber : Bagian Tata pemerintahan

## b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Berau dalam 5 tahun terakhir 2019-2023 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Prestasi ini harus terus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Berau.

Tabel 3.3 Capaian Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau

No	Tahun	Opini BPK
1	2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	2023	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
6	2024	Proses Pemeriksaan BPK

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025*

#### IV. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

##### a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

##### Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah kabupaten Berau, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tersebut diatas dalam Tahun anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau TA 2023 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	303.864.396.033,00	343.480.236.165,39	113,04	286.669.630.661,78
2	Pendapatan Transfer	5.774.413.283.269,00	5.774.506.770.500,00	100,00	4.406.411.710.669,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98	7.822.834.044,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.107.982.827.838,00</b>	<b>6.194.026.383.086,08</b>	<b>101,41</b>	<b>4.700.904.175.374,78</b>

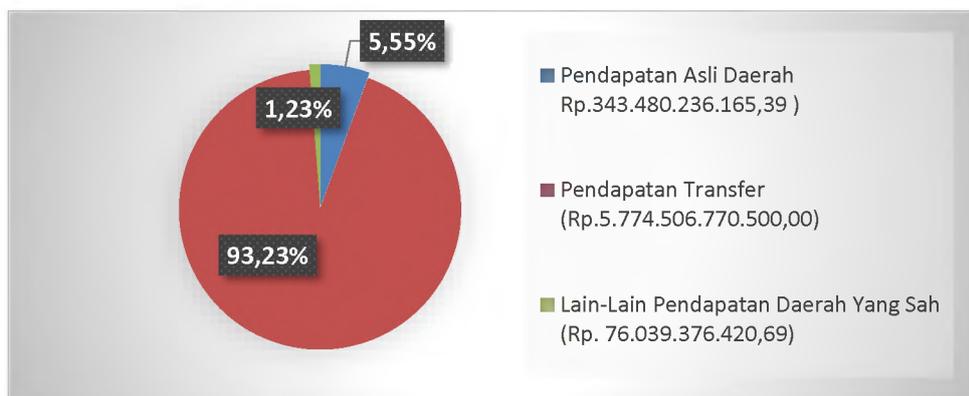
Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa Target Pendapatan Kabupaten Berau TA.2023 Rp 6.107.982.827.838,00 terealisasi sejumlah Rp 6.194.026.383.086,08 atau 101,41% dari target,

mengalami **kenaikan** sejumlah Rp1.493.122.207.711,30 atau 31,76% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sejumlah Rp 4.700.904.175.374,78.

Komposisi kontribusi realisasi Pendapatan Tahun 2024 terlihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Kabupaten Berau 2024



Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

Masing-masing realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode TA 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	93.558.789.845,00	91.558.760.332,00	97,86	93.382.456.473,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	110.642.378.350,00	18.110.450.696,00	16,37	14.933.984.444,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.600.000.000,00	17.957.639.584,26	91,62	16.119.182.280,09
4	Lain-lain PAD Yang Sah	80.063.227.838,00	215.853.385.553,13	269,60	162.234.007.464,69
	<b>Jumlah</b>	<b>303.864.396.033,00</b>	<b>343.480.236.165,39</b>	<b>113,04</b>	<b>286.669.630.661,78</b>

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Berau telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp303.864.396.033,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp343.480.236.165,39 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp56.810.605.503,61 atau 19,82% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 286.669.630.661,78

## 2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.774.506.770.500,00. Komposisi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Anggaran Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	4.813.515.450.269,00	4.847.083.601.192,00	100,70	3.579.099.939.714,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	109.441.195.000,00	112.337.773.000,00	102,65	93.677.389.000,00
2	Pendapatan Transfer antar daerah	851.456.638.000,00	815.085.396.308,00	95,73	733.634.381.955,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.774.413.283.269,00</b>	<b>5.774.506.770.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.406.411.710.669,00</b>

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

Dari tabel diatas Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp 5.774.506.770.500,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.774.413.283.269,00 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.368.095.059.831,00 atau 31,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.406.411.710.669,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan disajikan sebagai berikut :

a) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

Tabel 4. 2 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau  
TA. 2024 dan TA. 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.005.399.285.269,00	4.053.383.565.000,00	101,20	2.846.123.582.480,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	589.047.874.000,00	588.991.002.328,00	99,99	565.773.403.521,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.281.122.000,00	80.364.880.846,00	97,67	52.763.540.954,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	136.787.169.000,00	124.344.153.018,00	90,90	114.439.412.759,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.813.515.450.269,00</b>	<b>4.847.083.601.192,00</b>	<b>100,70</b>	<b>3.579.099.939.714,00</b>

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Tabel 4.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
– Lainnya TA. 2024 dan TA. 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Insentif Fiskal	13.972.553.000,00	16.869.131.000,00	100,00	0,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	95.468.642.000,00	95.468.642.000,00	0,00	93.677.389.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>109.441.195.000,00</b>	<b>112.337.773.000,00</b>	<b>102,65</b>	<b>93.677.389.000,00</b>

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

c) Pendapatan Transfer antar daerah

Tabel 4.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer antar daerah  
Kabupaten Berau TA. 2024 dan TA. 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	495.496.638.000,00	459.125.396.308,00	92,66	509.121.881.955,00
2	Bantuan keuangan	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00	224.512.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>851.456.638.000,00</b>	<b>815.085.396.308,00</b>	<b>95,73</b>	<b>733.634.381.955,00</b>

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah`

Pemerintah Kabupaten Berau telah merealisasikan Lain-lain  
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 adalah

sebesar Rp 76.039.376.420,69 dari target yang dianggarkan sebesar Rp 29.705.148.536,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2024 dan TA. 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98	7.822.834.044,00
	Jumlah	29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98	7.822.834.044,00

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Berau telah menganggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 29.705.148.536,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 76.039.376.420,69 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp 68.216.542.376,69 atau 872,02% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 7.822.834.044,00

#### b. Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah menganut kebijakan pengalokasian dana dengan susunan sebagai berikut

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan sebesar Rp 6.999.194.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 6.411.806.512.153,84. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.

Realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan fungsi terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

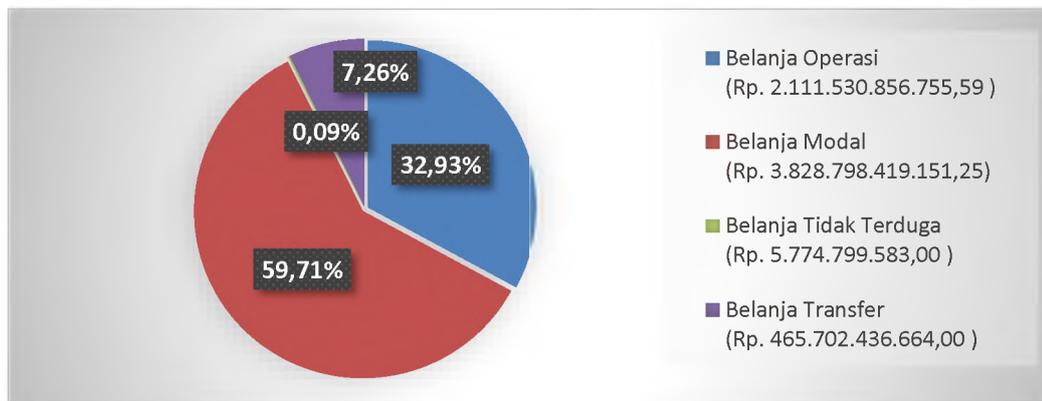
Perbandingan komposisi belanja daerah berdasarkan kelompoknya disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 4.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.406.630.766.545,02	2.111.530.856.755,59	87,74	1.818.795.262.619,26
2	Belanja Modal	4.103.994.263.579,98	3.828.798.419.151,25	93,29	2.345.617.541.442,00
3	Belanja Tak Terduga	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51	1.826.837.315,00
4	Belanja Transfer	465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95	441.881.227.088,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.999.194.000.000,00</b>	<b>6.411.806.512.153,84</b>	<b>91,61</b>	<b>4.608.120.868.464,26</b>

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

Gambar 4.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.411.806.512.153,84 atau 91,61% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.999.194.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.608.120.868.464,26. Belanja Daerah mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.803.685.643.689,58 atau 39,14%. Rincian Belanja Daerah disajikan sebagai berikut :

1) **Belanja Operasi**

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.111.530.856.755,59. atau 87,74% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 2.406.630.766.545,02. Realisasi Tahun 2024 mengalami **kenaikan** sebesar Rp292.735.594.136,33 atau 16,10% dari tahun sebelumnya. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau TA. 2024 dan TA. 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.152.667.557.073,60	1.038.160.066.708,34	90,07	812.677.295.576,65
2	Belanja Barang dan Jasa	1.028.744.361.989,42	868.596.837.598,25	84,43	834.570.312.408,61
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	209.963.847.482,00	189.599.952.449,00	90,30	163.011.244.933,00
6	Belanja Bantuan Sosial	15.255.000.000,00	15.174.000.000,00	99,47	8.536.409.701,00
	Jumlah Belanja operasi	2.406.630.766.545,02	2.111.530.856.755,59	87,74	1.818.795.262.619,26

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

## 2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 3.828.798.419.151,25 atau 93,29% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.103.994.263.579,98. Realisasi Belanja Modal mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.483.180.877.709,25 atau 63,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 20223. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 4.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2024 dan TA. 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	16.586.742.200,00	1.352.415.463,00	8,16	7.825.488.693,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.149.073.890,00	261.092.131.764,29	93,53	172.966.458.500,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	580.117.759.021,98	472.715.286.591,51	81,49	307.876.754.279,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.215.293.974.101,00	3.081.747.295.756,45	95,85	1.848.412.488.655,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.278.373.017,00	7.214.571.667,00	99,12	8.536.351.315,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.103.994.263.579,98	3.828.798.419.151,25	93,29	2.345.617.541.442,00
	Total				

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

### 3) **Belanja Tak Terduga**

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pemerintah Kabupaten Berau menganggarkan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp22.640.327.875,00 Terealisasi sebesar Rp5.774.799.583,00 atau 11,77%

### 4) **Belanja Transfer**

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp465.702.436.664,00 atau 99,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp441.881.227.088,00. Belanja Transfer mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.821.209.576,00 atau 5,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp441.881.227.088,00. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA. 2024 dan TA. 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	11.100.000.000,00	11.024.007.000,00	99,32	9.540.281.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	454.828.642.000,00	454.678.429.664,00	99,97	432.340.946.088,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja Transfer	465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95	441.881.227.088,00

Sumber : LRA Keuangan Pemerintahan Daerah per 19 Maret 2025

## V. INOVASI DAERAH

Dalam upaya memberikan Pelayanan kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Berau selalu berupaya menciptakan Inovasi-inovasi baru yang dapat lebih mempermudah, mempercepat dan memberikan pelayanan prima. Inovasi-inovasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini, adalah sebagai berikut :

1. Aktif Prestasi (Layanan Kolektif Petugas Registrasi Online) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, Masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah dan murah. Meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan Masyarakat bila harus mengurus ke Kantor Disdukcapil Berau
2. Sistem Pelayanan Data Dan Pengaduan Satu Pintu pada Dinas Sosial yang memudahkan kinerja pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas
3. JAGAU PHBS pada Puskesmas Sambaliung merupakan Inovasi yang bertujuan agar masyarakat dan aparatur kampung dapat sedini mungkin mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, seta mampu mengupayakan, mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan yang didapatkan. kemudian dapat membentuk program UKBM yang diinisiasi oleh, dari dan untuk masyarakat, Seluruh siklus hidup mendapatkan akses/pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Meningkatnya pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melakukan PHBS, jug a dapat Meningkatkan peran aktif kemandirian masyarakat dalam gerakan PHBS
4. Si Bang Koko Mantap pada Dinas Perkebunan yang Memberikan dukungan dan mewujudkan Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dimana Kakao merupakan bagian dari komoditas

pangan yang digunakan untuk bahan dasar industry pengolahan pangan

5. KOPI DANGDUT ASIK ( Kolaboratif Pengelolaan Udang Windu Tiger Berbasis Kawasan ) pada Dinas Perikanan merupakan keberlanjutan usaha budidaya tambak di kawasan budidaya udang windu, menciptakan keseimbangan antara sisi ekonomi dan ekologi, Penyerapan tenaga kerja lokal, Dukungan program kegiatan budidaya oleh DKP Provinsi Kalimantan Timur, Dukungan program revitalisasi, Peningkatan PDRB sektor perikanan, Dampak sosial ekonomi bagi pelaku usaha budidaya/ petambak dan multi player effect bagi masyarakat lokal, Tata Kelola kawasan budidaya udang yang terintegrasi dan Mendukung program karbon di kawasan budidaya tambak.
6. SIDIKMAS (Sistem Informasi Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan yang merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk agar dapat memudahkan kepada masyarakat dalam melakukan legalisir ijazah pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) serta aplikasi ini juga memuat informasi lembaga yang mengeluarkan ijazah, pemilik ijazah dan tahun penerbitan ijazah pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) secara online dan dapat mencetak arsip ijazah untuk kebutuhan lainnya seperti lampiran kehilangan ijazah asli sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) di Kepolisian, Aplikasi ini berjalan secara real-time selama 24 Jam dan dapat diakses dimana saja, Khususnya Seksi Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat serta Bahasa dan Sastra
7. SIDIRGA KALTIM pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan sistem berbasis web digunakan untuk menampung data Standar Harga sebagai acuan awal perencanaan dan penganggaran. Sidirga merupakan jembatan

untuk memudahkan OPD menginput data RKBMD sebelum dimasukan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). melalui aplikasi Sidirga kedepan perencanaan akan kebutuhan RKBMD akan lebih baik lagi dalam hal penganggaran semua kegiatan bisa terukur

8. WISATA BEDARI (Wisata Biatan Destinasi Berbasis Alam, Desa dan Kearifan Lokal) pada Kecamatan Biatan yang memberikan manfaat Mendukung Program Unggulan Bupati Kabupaten Berau satu dari 18 Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Berau tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Berau Wisatawan dapat menikmati perjalanan wisata. masyarakat menjadikan biatan sebagai tujuan wisata dan dekat serta meningkatnya ekonomi dan budaya lokal masyarakat Biatan
9. SIPOMED (Sistem Pendaftaran online dan telemedicine) pada RSUD Abdul Rivai yang memberikan manfaat meringankan beban loket pendaftaran, mempercepat proses pelayanan, pasien tidak perlu antri screening covid 19, memudahkan pasien, tidak perlu antri di loket pendaftaran, pasien dapat langsung antri di poliklinik serta kepastian layanan dengan berbagai variasi layanan pendaftaran
10. Mendamba RIRA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang yang mengarah pada percepatan Kabupaten Berau menuju Kabupaten Layak Anak dengan melakukan pendampingan pada pusat kreativitas anak melalui rumah ibadah dengan konsep inovasi bukan membangun rumah ibadah baru, tetapi bagaimanapun memanfaatkan rumah ibadah yang sudah ada untuk pemenuhan hak anak serta memanfaatkan waktu luang dalam bentuk kegiatan positif, inovatif dan kreatif (PIK) terintegrasi dengan kegiatan rumah ibadah sekaligus mendekatkan anak dengan agamanya.

11. Sistem Informasi Pemetaan Pertanahan (SIPP) pada Kecamatan Tanjung Redeb merupakan Sistem Aplikasi Digital sebagai antisipasi masalah tanah dan mempermudah informasi serta pemantauan mengenai lokasi bidang tanah, posisi lahan warga, dan titik koordinat lahan bidang tanah
12. PIKATI ( Peluang Integrasi dan Kolaborasi untuk Transformasi Investasi di Kabupaten Berau) pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan integrasi dan Kolaborasi Investasi sebagai bukti nyata koordinasi lintas perangkat daerah dalam transformasi Investasi. Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif atau Pemberian Kemudahan mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan. Mendapatkan Informasi dan pelayanan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal
13. SIWALET (Sistem Informasi Wadah Aplikasi Elektronik Terintegrasi) pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki keunggulan Efisiensi Waktu; Proses yang lebih cepat dan sistematis mengurangi waktu menunggu untuk mendapatkan izin, Transparansi; Pengguna dapat dengan mudah memantau proses permohonan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penerbitan izin dan Aksesibilitas; Aplikasi ini dapat diakses kapanpun dan dimana saja sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu.

## **VI. PENUTUP**

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 kepada masyarakat.

Secara garis besar, RLPPD Kabupaten Berau berupaya menggambarkan capaian kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2024.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini disampaikan. Kami selaku penyelenggara pemerintahan, menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sepenuhnya belum bisa memuaskan semua pihak/stakeholder dan masih banyak yang perlu kita perbaiki bersama. Untuk itu, kami pun membuka hati untuk menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dari semua pihak. Untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu adanya komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat, didukung dengan semangat kebersamaan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Terima Kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU**